

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan pengertian dan pemahaman terhadap Judul skripsi “PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN WANITA TUNA SUSILA DI BALAI PEMULIHAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA (BPSWTS) CIREBON JAWA BARAT” ini, perlu adanya penafsiran maksud dari kata-kata yang terkandung dalam judul tersebut.

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang mendapat imbuhan pem-an. Berdaya dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti: (1) Berkekuatan, berkemampuan, bertenaga; (2) Mempunyai akal (cara muslihat dsb) untuk mengatasi sesuatu dsb.¹

Menurut Eric Sharge pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang merubah individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat ia tinggal. Persepsi ini bergerak dari korban (victim) ke pelaku (agen) karena

¹ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 189.

orang mampu bertindak dalam area sosial, politik dan berusaha memenuhi kepentingannya.²

Dalam skripsi ini, yang penulis maksud dengan pemberdayaan yaitu suatu proses kegiatan dalam usaha meningkatkan potensi atau kemampuan seseorang atau kelompok, sehingga kelak dapat membantu memberikan jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi, yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan ekonomi.

2. Wanita Tuna Susila

Wanita Tuna Susila (WTS) atau yang sering disebut dengan Pelacur, adalah mereka yang bertindak asusila atau yang bertentangan dengan norma. Tuna susila atau tindak susila diartikan sebagai: kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri kepada banyak laki-laki untuk memuaskan seksual dan mendapat imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya.³ Dan wanita tersebut adalah yang terdaftar atau tercatat sebagai siswi atau klien Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila di Palimanan Cirebon Jawa Barat.

Jadi pemberdayaan Wanita Tuna Susila yang penulis maksud adalah usaha pemberian daya kepada wanita penyandang tuna susila (WTS) melalui kegiatan-kegiatan yang terencana, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi di bidang agama dan ekonomi, supaya mereka dapat profesional dibidang tersebut.

² Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996), hlm. 63.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta : Rajawali, 2003), hlm.177.

3. Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila

Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila (BPSWTS) merupakan salah satu UPDT Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat yang berada di kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon propinsi Jawa Barat. BPSWTS Cirebon ini memberikan pelayanan bimbingan agama, sosial, fisik, mental, latihan ketrampilan, bantuan psikososial, pendampingan serta bantuan hukum bagi klien Wanita Tuna Susila.⁴

Berdasarkan pemahaman terhadap istilah yang ada pada judul diatas, maka maksud dari skripsi “Pelaksanaan Pemberdayaan Wanita Tuna Susila di Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila (BPSWTS)” adalah penelitian tentang proses pelaksanaan pemberdayaan terhadap Wanita Tuna Susila (WTS) oleh BPSWTS Cirebon melalui kegiatan bimbingan di bidang agama dan ekonomi. Pelaksanaan dari kegiatan tersebut pada siswi angkatan II tahun 2004.

B. Latar Belakang Masalah

Wanita Tuna Susila (WTS) atau yang biasa disebut dengan pelacur merupakan penyakit masyarakat yang keberadaannya banyak di tentang, baik oleh norma hukum, adat dan agama. Pekerjaan ini juga efek yang di timbulkannya begitu besar, seperti penyakit kelamin atau syphilis, kencing nanah, AIDS dan lainnya. Allah telah melarang perbuatan tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam surat Isra' ayat 32 :

menolong dan mendukung terhadap sesamanya dalam perbuatan kebaikan, karena setiap manusia mempunyai hak, kewajiban dan derajat yang sama di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian Wanita Tuna Susila tidak terkecuali karena mereka juga manusia. Akan tetapi karena gangguan, hambatan dan ketidakberdayaannya mereka memerlukan pertolongan untuk mampu mengembangkan potensinya serta agar mampu merasakan hidup layaknya orang normal. Untuk itulah pemerintah telah berusaha melalui departemen sosial dengan mengadakan pencegahan, pengawasan dan pemberdayaan lewat Dinas Sosial Propinsi Jawa barat, kemudian Dinas Sosial tersebut memberikan wewenang kepada Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila atau BPSWTS Cirebon untuk membimbing dan memperdayaan, sehingga kelak menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

Usaha-usaha untuk menciptakan tujuan tersebut tidaklah mungkin dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Melainkan memerlukan waktu yang panjang dan usaha-usaha yang intensif agar tercipta cita-cita yang agung.

Untuk mengurangi pelacuran diusahakan melalui aktifitas rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka dikembalikan sebagai masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan ketrampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.⁸

⁸ Kartini Kartono, Op., Cit. hlm. 227-228.

Melalui razia atau penjarangan pelacur, usaha penyerahan dari Dinas Sosial atau Pemda Jawa Barat serta penyerahan diri keluarga pelacur yang ada di daerah provinsi Jawa Barat, BPSWTS Cirebon telah mendapatkan siswi atau klien. Kemudian diberikan bimbingan dan pelatihan, terutama bimbingan keagamaan, supaya kelak mereka dapat menata hidupnya sesuai dengan ajaran agama dan yang tak kalah pentingnya yaitu bimbingan dan pelatihan di bidang ekonomi, dalam hal ini BPSWTS Cirebon memberikan ketrampilan kerja yang bertujuan agar mereka menjadi tenaga yang cakap dalam mengisi pembangunan.

Dari hasil pengamatan sementara melalui bimbingan agama dan ekonomi (ketrampilan kerja) yang dilakukan BPSWTS Cirebon ini dapat membantu, mendorong dan memberi banyak kemampuan wanita tuna susila untuk mengembangkan potensi mereka. Ini dapat dilihat dari eksistensi wanita tuna susila yang sama sekali berbeda dengan sebelum memasuki BPSWTS Cirebon, seperti berpakaian menutup aurat, sederhana dan tidan mencolok, lebih trampil dan lain sebagainya.

Adapun bimbingan agama yang ada di BPSWTS Cirebon meliputi akhlak atau budi pekerti, baca tulis Al-Qur'an, fiqih dan aqidah. Sedangkan bimbingan ketrampilan yang diberikan yaitu menjahit, membordir, tata boga, olah pangan, industri rumah tangga, dan tat arias rambut. Apabila dicermati lebih jauh sesungguhnya kedua bimbingan tersebut sangat tepat diberikan kepada eks WTS untuk membekali diri dan mencegah terjerumusnya kembali pada pekerjaan yang asusila.

Berhubungan dengan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pemberdayaan di bidang agama dan ekonomi terhadap siswi atau klien BPSWTS Cirebon sebagai salah satu lembaga sosial yang berada di Jawa Barat yang menampung dan memberikan bimbingan agama dan memberikan bimbingan ketrampilan yang dilaksanakan hampir setiap hari dan lebih di prioritaskan untuk membekali siswinya, agar mereka menjadi orang yang berguna dan tidak menimbulkan masalah-masalah sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Wanita Tuna Susila yang dilakukan Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila Palimanan (BPSWTS) Cirebon Jawa Barat di bidang agama dan ekonomi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan Wanita Tuna Susila di Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila (BPSWTS) Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan pemberdayaan Wanita Tuna Susila yang di lakukan di BPSWTS Cirebon dalam aspek keagamaan dan ekonomi.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan Wanita Tuna Susila di BPSWTS Cirebon.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritik penelitian ini diharapkan mengembangkan ilmu pementasan pelacuran dan peningkatan kualitas pelaksanaan pemberdayaan wanita tuna susila.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan input khususnya dalam pemberdayaan wanita penyandang tuna susila dan menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga Sosial maupun organisasi yang bergerak dalam usaha pemberdayaan WTS.

F. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Pemberdayaan WTS

a. Pengertian Pemberdayaan WTS

Dalam bahasa asing istilah pemberdayaan disebut dengan kata "Empowerment", kata tersebut jika dicari term-termnya akan di peroleh sebagai berikut:

- 1) Power berarti kekuasaan.
- 2) Powerful berarti kuat, penuh kuasa.
- 3) Powerless berarti tidak berdaya.
- 4) Empower berarti memberi kuasa.

Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat Interchangeable atau dapat dipertukarkan.⁹

Dan menurut Ginandjar Kartasasmita “pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.¹⁰

Dengan demikian secara umum, di yakini bahwa pemberdayaan mempunyai tujuan dua arah yaitu: *pertama*, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan yang *kedua*, memperkuat posisi tawar pada lapisan masyarakat bawah kepada struktur kekuasaan yang lebih.

Pemberdayaan perempuan menurut Melly G. Tan selain ada dukungan dari lembaga sosial maupun pemerintah pemberdayaan perempuan harus bersifat demokratis dan membagi kekuasaan.¹¹

Dalam konteks Indonesia, aspek terakhir inilah yang perlu di tekankan, bahwa pemberdayaan perempuan berarti keinginan, bahkan tuntutan, membagi kekuasaan (*sharing power* dengan tekanan pada *sharing*) dalam posisi setara (*equal*), representasi serta partisipasi

⁹ Nini Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Sampai Tradisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 41-42.

¹⁰ Ginandjar Kartasasmita. Ibid. hlm. 140.

¹¹ Nafsiyah Mboi, *Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: PSKW Program Pasca Sarjana UT), hlm. 12.

dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Seperti juga di kemukakan diatas, tampak kepada keluarga adalah bahwa hal ini akan memperkuat bukan hanya keadaan dan posisi perempuan, tetapi sekaligus memperkuat ketahanan keluarga, karena kedua orang tua, ayah/suami dan ibu/isteri, bersama-sama bertanggung jawab atas kesejahteraannya.¹²

Dari pengertian diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan WTS merupakan proses kegiatan yang melibatkan dukungan dari lembaga sosial, pemerintah atau organisasi dalam rangka memberikan daya dan mengembangkan potensi WTS untuk dapat kembali di kehidupan yang lebih baik dan dapat berperan kembali dilingkungan keluarga, masyarakat dan negara.

b. *Proses Pemberdayaan WTS*

Pemberdayaan terhadap perempuan berarti juga memperdayakan sebagian besar generasi bangsa Indonesia. Seperti yang diungkapkan “didiklah perempuan, maka kita mendidik bangsa” atau “wanita tiang negara”

Permasalahan yang dihadapi kaum perempuan Indonesia adalah kompleks sifatnya dan hanya dipecahkan apabila kaum perempuan Indonesia memiliki organisasi yang secara mandiri mampu berfungsi sebagai kekuatan lobi yang efektif baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dalam situasi Indonesia pada saat ini organisasi

¹² *Ibid.*

perempuan seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK mempunyai potensi yang kuat untuk menjadi kekuatan lobi bagi perjuangan perempuan.¹³

Dalam proses pemberdayaan perempuan peran lembaga sosial dan pemerintah sangat menentukan. Menurut Mubyarto lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dalam perkembangannya telah mampu menguasai kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan bahwa setiap masyarakat hidup dalam bentuk dan dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu, yang dimaksud dengan lembaga atau institution disini adalah organisasi-organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal yang mengatur tindakan dan perilaku anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin setiap hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu”.¹⁴

Demikian juga proses pemberdayaan WTS lebih efektif jika dilakukan berkelompok atau dalam suatu komunitas dan kegiatan-kegiatannya menitik beratkan pada dua hal yaitu kegiatan untuk mencegah terjadi pelacuran lagi dan kedua untuk menghapus atau menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya, untuk kemudian membawa mereka kejalan yang benar.

¹³ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta Kansius, 1997), hlm. 75.

¹⁴ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanianm*, (Jakarta: LP3ES, 1973), hlm. 273.

Menurut Hanry Hikmat proses dari pemberdayaan agar mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara komunikatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang di miliki seseorang semakin baik kemampuan berpartisipasi.¹⁵

Proses pemberdayaan perempuan tidak jauh berbeda dengan proses pemberdayaan WTS. Hanya saja WTS/pelacur lahir dari kekakuan sistem moral. Jadi, hubungan-hubungan kekuasaan dalam pelacuran haruslah dikaji dari tempat spesifik ekspresi, dengan turut mempertimbangkan dimensi-dimensi subyektif dan objektifitasnya.¹⁶

Dengan demikian proses pemberdayaan WTS harus melihat pada realita kehidupan, sehingga perlu di upayakan pada penerapan terhadap nilai-nilai kehidupan nyata di masyarakat agar pemberdayaan lebih kontekstual dan lebih bermakna.

c. *Unsur-Unsur Pemberdayaan WTS*

1. Subyek/ Pembimbing

Dalam pelaksanaan pemberdayaan WTS akan dapat berjalan dengan baik jika pembimbing atau orang yang bertugas melaksanakan proses pemberdayaan WTS dapat memahami

¹⁵ Hanry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 4.

¹⁶ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 162.

persyaratan yang berhubungan dengan sikap dan kemampuan yang harus dimiliki.

Adapun seorang pembimbing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Menghormati manusia dan haknya untuk menentukan nasibnya dan mengatur kehidupannya.
- b) Kemampuan untuk serta merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang dengan tidak merasakan seperti orang itu.
- c) Kemampuan untuk menerima permusuhan dan agresi seperti kecintaan dari seseorang sebagai reaksi normal antara manusia terhadap sesama manusia.
- d) Kemampuan untuk mengerti bahasa dari kelakuan dan mempergunakan kemampuannya sendiri untuk kepentingan seseorang atau kelompok.
- e) Kemampuan untuk memiliki pengertian bahwa semua tingkah laku mempunyai tujuan dan bahwa gerak seseorang atau kelompok itu mempunyai arti sendiri, meskipun menurut yang mempelajari tidak mempunyai arti.
- f) Kemampuan untuk menerima seseorang atau kelompok sehinggapun ia tidak menyetujui kelakuannya.
- g) Kemampuan untuk menerima peranan dari kewibawaan terhadap seseorang atau kelompok yang membutuhkan ketentuan terhadap pembatasan dan pandangan yang dipersempit.

- h) Kemampuan untuk mempergunakan kewibawaan dengan taida memberikan putusan.
 - i) Kemampuan untuk memnerikan persetujuan dan perluasan pandangan dimana seseorang dan kelompok membutuhkan bantuan untuk mencapai tanggung jawab secara pribadi dan kolektif.
 - j) Kemampuan untuk menerima seseorang dan kelompok sebagai suatu yang unik, dan haknya untuk mempunyai perbedaan.¹⁷
2. Obyek Pemberdayaan WTS

Obyek pemberdayaan WTS adalah individu maupun kelompok yang dianggap mempunyai masalah baik berkaitan dengan agama, kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya sarta yang beragama Islam. Adapun orang-orang yang telah memeluk agama Islam keadaannya bisa kita dibagi dua yaitu:

- a) Muslim formil yaitu mereka yang telah menyatakan muslim, tetapi belum memahami apalagi mengamalkan ajaran Islam.
- b) Muslim riil yaitu mereka yang telah menyatakan muslim, dan mengamalkan ibadah-ibadah dan ajaran-ajaran Islam sebagai mana mestinya.¹⁸

Termasuk yang menjadi obyek pemberdayaan WTS adalah muslim formil bagi pemberdayaan agama dan non muslim atau

¹⁷ Sumantri Praptokusumo, *Isi, Tujuan dan Kedudukan Pekerdjaan Sosial di Indonesia*, (Yogyakarta : Balai Penelitian pekerjaan Sosial, 1956), hlm.58-59.

¹⁸ Masdar Helmi, *Dakwah Dalam Pembangunan*, (Semarang: Toha Putra, 1973), hlm. 53.

seluruh siswi tanpa kecuali bagi pemberdayaan ekonomi, sehingga dengan cara perlahan-lahan mereka dapat menggali potensinya dan dapat bersosialisasi kembali.

3. Metode Pemberdayaan WTS

Untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemberdayaan WTS dapat dilakukan dengan metode:

- a) Metode individu atau *social case work* yaitu merupakan suatu teknik untuk memperoleh jawaban terhadap kasus sitasi-situasi individual. Yaitu dengan melakukan konsultasi, yang dilaksanakan di dalam kelas atau ruangan dibuat berdasarkan ujian-ujian psikologis dan rekomendasi dari psikologis.¹⁹
- b) Metode kelompok atau *social group work* yaitu merupakan suatu teknik yang digunakan dengan melibatkan kelompok-kelompok anak didik, orang tua dan pihak-pihak lain,²⁰ untuk membantu meningkatkan kualitas kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya forum diskusi, ceramah dialog, penyuluhan dan lain-lainnya.
- c) Metode sosial masyarakat atau *community organization* yaitu metode yang digunakan untuk menciptakan relasi dengan

¹⁹ Kasni Hariwoeryanto, *Metoda Penelitian kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Karya Nusantara, 1987), hlm. 22.

²⁰ *Ibid.* hlm. 36.

tokoh-tokoh masyarakat serta menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat di masyarakat.²¹

5. Tujuan Pemberdayaan WTS

Setiap usaha yang baik harus memiliki tujuan yang jelas sehingga mudah untuk menentukan langkah-langkah yang mengarah pada tercapainya suatu tujuan. Usaha itu sendiri mempunyai permulaan dan mengalami akhir pula dan pada umumnya berakhir pada tujuan akhir yang telah di capai.

Adapun tujuan pemberdayaan WTS secara umum adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan khususnya yaitu:

- a) Membantu individu agar mampu menghadapi masalah dan menyelesaikannya.
- b) Membantu individu dalam mengembangkan potensi dan mengelolanya dengan baik.
- c) Memberikan motivasi agar dapat kembali kepada kehidupan dan jalan yang benar sarta dapat bersosialisasi kembali.

6. Media/ Sarana

Sarana/ media adalah unsur yang penting dan dibutuhkan dalam proses pemberdayaan WTS. Adapun yang dimaksud sarana pemberdayaan adalah dana, instrumem dan tempat.

²¹ *Ibid.*

Dana adalah untuk membantu suatu kegiatan agar dapat terlaksana, instrumen yang berarti alat untuk mengerjakan sesuatu seperti peralatan-peralatan fisik (meja, kursi, buku, lampu, musholla dan lain-lain). Dan tempat adalah yang paling penting untuk dapat melaksanakan kegiatan, adapun tempat yang baik adalah yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pemberdayaan WTS.

d. *Bentuk-Bentuk Pemberdayaan WTS*

1. Pemberdayaan di Bidang Agama

Dalam pandangan Agus Effendi, degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang kesadaran Islam, kepribadian kaum muslim - terutama mayoritas generasi mudanya - begitu telanjang berkooptasi oleh budaya negatif barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam.²²

Pemberdayaan dalam tataran rohaniah ini sebagai sesuatu yang fundamental dan esensial dalam kehidupan. Sehingga pemberdayaan ini bermaksud mengajak kepada individu atau kelompok masyarakat supaya kembali kepada nilai-nilai agama Islam. Pemberdayaan ini diasumsikan dengan pemberdayaan umat, yaitu sebuah upaya strategis masyarakat pembangunan sebuah sistem dan struktur masyarakat dengan segala kelengkapannya: Aqidah, pemikiran, Akhlak, muamalah, siasah dan lainnya. Tentu

²² Nini Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Loc. Cit., hlm. 44.

saja pemberdayaan umat dalam bidang aqidah menjadi landasan pokok bagi pemberdayaan secara keseluruhan.

Sebagaimana pendapat Abdullah 'Azzam: "Penyelewengan dan ketimpangan yang diderita umat manusia baik secara individu maupun masyarakat merupakan akibat penyelewengan dan penyimpangan dari pemahaman dan pengertian aqidah yang rinci dan samar-samar".²³

Dengan demikian pengenalan tentang ajaran agama dan pengamalan nilai-nilainya sangat penting untuk mengontrol tingkah laku manusia. Dalam hal ini agama bagi Clifford Geertz adalah sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motifasi-motifasi yang kuat yang meresapi dan tahan lama, dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan, yang membungkus konsep ini dengan semacam faktualisasi sehingga suasana hati dan motifasi-motifasi itu tampak lebih realitas.²⁴

Untuk membina masyarakat melalui ajaran Islam diperlukan beberapa aspek untuk mendukung terlaksananya pembinaan tersebut. Adapun aspek-aspek ajaran Islam antara lain aspek aqidah, ibadah, akhlak, muamalah dan bacatulis Al-Qur'an.

²³ *Suara Hidayatullah*, Edisi 12/X IV, April, 2002, hlm. 16-17.

²⁴ Atho Mudzhar, DKK, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia dan Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 273.

Dalam hal ini penulis mengambil dua aspek yaitu akhlak dan baca tulis Al-qur'an.

a. Akhlak

Akhlak adalah kebiasaan,²⁵ dalam bertindak dalam pergaulan terhadap sesama, dimana manusia diatur menurut norma-norma yang berlaku. Hal ini merupakan konsekuensi lanjut daripada kesanggupannya untuk hidup, cepat atau lambat masa itu harus dimilikinya dengan usaha memperbaiki diri.

Adapun tujuan dari pembinaan akhlak agar WTS :

- Mengerti tentang akhlak yang baik dan yang buruk
- Menyadari/ menginsyafkan
- Berlaku sesuai dengan akhlak Islami

Sedangkan ruang lingkup akhlak islami cakupannya sangat luas, yaitu . ethos, ethis, moral dan estetika. Adapun keterangannya sebagai berikut :

- Ethos, yang mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya Al- Mabud Bihaq serta kelengkapan uluhiyahnya dan rububiyah, seperti terhadap rosul-rasul Allah, kitab-kitab-Nya dan sebagainya.
- Ethis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya.

²⁵ Ahmad Amin, *Etika, Ilmu Akhlak*, (Jakarta: PT Karya Impreso, 1990), hlm 62.

- Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.
- Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pembahasan akhlak sangatlah luas cakupannya yakni akhlak terhadap Tuhan atau sang pencipta, diri sendiri orang lain dan lingkungan sekitar, yang pada dasarnya manusia digerakkan untuk dapat menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan melalui cara-cara yang baik.

Akhlak Islami memiliki pondasi terhadap doktrin agama (yaitu Al-Qur'an dan hadits) dan harus diimbangi dengan kemampuan berfikir secara logis,²⁷ sehingga keselarasan dalam bertindak dalam kehidupan dimasyarakat dapat diterima dengan baik.

Dengan demikian pembinaan akhlak terhadap wanita tuna susila merupakan pembersihan jiwa agar jiwa mereka dapat bersih dari sifat-sifat tercela, maka harus dihiasi dengan

²⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik Penerjemah Amir Hamzah Tachrudin, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta : Darul Falah, 1423H.), hlm. 119-120.

²⁷ Laurence Kohlberk, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 71.

sifat-sifat terpuji seperti taqwa, tawakal, ikhtiar, sabar, belas kasih dan lain-lainnya.

b. Baca tulis al-Qur'an

Baca tulis al- Qur'an merupakan hal yang pokok untuk memahami ajaran Islam, karena lisan yng mampu membaca al-Qur'an dapat menjadikannya bacaan sehari-hari. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

اقراء باسم ربك الذى خلق. خلق الانسان من علق. اقراء
وربك الاكرم. الذى علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم

(العلق: ٥-١)

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah pencipta manusia. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perkataan kalam. Dia mengajarkan kepadamu apa yang tidak diketahuinya”²⁸

Adapun tujuan dari pengajaran baca tulis Al-Qur'an adalah agar WTS dapat:

- Membaca Al-Qur'an yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid
- Hafal beberapa surat pendek
- Menulis huruf Al-Qur'an

Sedang materi pengajaran baca tulis Al-Qur'an meliputi materi pokok yang berupa buku Iqra' jilid 1-6, kemudian dilanjutkan tadarus Al-Qur'an. Sedang materi penunjang yaitu materi hafalan bacaan sholat, surat-surat pendek, do'a sehari-hari dan ayat-ayat pilihan.²⁹

2. Pemberdayaan di Bidang Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi lebih sering digiatkan oleh lembaga sosial baik pemerintah maupun swasta, cakupannya sangat besar dan luas, dengan karakteristik yang dimilikinya sangat beragam tergantung dari sumber daya alam dan sumber daya manusia masyarakat setempat. Upaya dalam pemberdayaan ekonomi ini diharapkan masyarakat dapat mandiri dan berswadaya, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya sarta mampu bersaing di tengah-tengah globalisasi ini.

Karena peningkatan daya saing merupakan salah satu unsur internal yang perlu diperhatikan, disamping kita ikut membangun negara menghilangkan kemiskinan sebagian bangsa ini, kita juga harus peduli terhadap lingkungan hidup yang merupakan eksternal yang perlu kita hadapi selain fenomena globalisasi. Jadi bila kita telaah maka fokus perhatian kita tertuju pada hal internal yaitu

²⁹ Pedoman Pengelolaan Pembina dan Pengembangan Menulis dan Membaca Al-Qur'an (M3A), (Yogyakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca tulis Al-Qur'an), hlm. 30.

- 1) Aspek positif, kerajinan tangan sering didasarkan pada keahlian yang secara tradisional dilatihkan pada perempuan dan merupakan pekerjaan yang mudah disesuaikan dengan tempat tinggal dan tempat kerja mereka.
- 2) Aspek negatifnya, pekerjaan ini juga didasarkan pada missionaris kuno tentang pantas dan tidak pantas untuk pekerjaan perempuan, mencakup intensitas kerja tinggi dengan peralatan dan teknologi sedikit untuk menghasilkan produksi yang lebih banyak dan kurang mampu mengumpulkan modal.³²

Demikian juga Para WTS yang bekerja apapun pekerjaannya adalah merupakan nilai tambah yang sedikit atau banyak dapat berdampak pada kemandirian WTS sekaligus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri dan dapat berperan dalam otonomi (kontrol) ekonomi dalam keluarga.

Salah satu bidang ekonomi guna memperoleh kemandirian WTS yang paling praktis salah satunya dengan memberikan ketrampilan kerja yaitu kemampuan menemukan dan memanfaatkan pengembangan potensi untuk sikap kerja guna mendapatkan sumber nafkah atau mata pencaharian.³³

³² Nicky May dan The networkes, *Tiada Jalan Pintas, Panduan Untuk Pendamping Perempuan*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993), hlm. 99.

³³ YB. Suparlan, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm.65.

Dengan demikian WTS yang memiliki daya ekonomi atau ketrampilan, secara umum, mereka dapat memiliki akses ekonomi sendiri dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, berkeluarga dan bermasyarakat. Dan secara khusus, mereka akan lebih berkreasi dan memanfaatkan dalam rangka bekal hidup mandiri.

Dan menurut Kartini Kartono usaha tersebut adalah usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai : kegiatan untuk menekan (menghapus, menghindari) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasiswaan untuk kemudian membawa mereka kejalan yang benar.³⁴

Adapun hal yang terpenting dalam pelaksanaan ketrampilan salah satunya adalah pembagian atau pengelompokan. Pengelompokan tersebut dapat disesuaikan dengan minat dan bakat wanita tuna susila, karena hal ini akan dapat membantu dalam mendukung keberhasilan yang akan dicapai.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan WTS

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung proses pemberdayaan WTS adalah :

- Perkembangan informasi dan teknologi telah memberikan kesempatan untuk lebih mengembangkan kualitas potensinya.
- Meningkatnya tingkat pendidikan.
- Keamanan dan kenyamanan lingkungan.

³⁴ Kartini Kartono, *ibid*, hlm 227.

2. Faktor penghambat

Sedangkan faktor penghambat pemberdayaan WTS atau yang menghadang usaha pengentasan pelacuran ada dua hal, pertama soal biaya dan kedua kemauan pelacur sendiri.³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat pemberdayaan WTS adalah :

- Hambatan fisik, yaitu terbebani oleh status mereka yang asusila.
- Hambatan pandangan, hambatan ini muncul oleh pemikiran yang pesimistis.
- Hambatan teknis, hambatan ini dimunculkan pada kurangnya penyediaan sumber daya manusia dan lain-lainnya.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁶

Untuk memperoleh hasil yang sempurna dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan metode yang mendukung. Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan sebagai berikut :

³⁵ Suara Hidayah, Edisi 08/Th XIV Desember 2001, hlm. 74.

³⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung, Remaja Rosda karya, 2002), hlm. 3.

1. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan atau Field Research yaitu penelitian yang dilakukan tempat terjadinya gejala-gajala.³⁷

Untuk mendapatkan data subyektif mengenai suatu penelitian yang sedang di teliti, perlu adanya subyek penelitian yang ada dalam Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila (BPSWTS) Cirebon yaitu:

- a. Pimpinan atau pegawai BPSWTS Cirebon
- b. Urusan tata usaha
- c. Pembimbing Agama Islam dan ketrampilan kerja.
- d. Siswi atau klien BPSWTS Cirebon

Sedangkan obyek penelitian disini adalah proses pelaksanaan pemberdayaan wanita tuna susila yang dilakukan BPSWTS Cirebon-Jawa Barat, yang meliputi bidang agama: Akhlak dan Baca Tulis Al-Qur'an, dan bidang ekonomi: ketrampilan menjahit, membordil, tata boga, olahan pangan, industri rumah tangga dan tata rias rambut.

2. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran yang dipandang Ilmiah dalam suatu penelitian. Adapun yang digunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan ini adalah dengan menggunakan:

³⁷ Soetrisna Hadi, *Metode Research*, (yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 130.

a. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian³⁸

Metode ini mengandung arti adanya suatu kegiatan untuk menghimpun atau mencari informasi dengan jalan melakukan Tanya jawab langsung bertatap muka (face to face) dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki.

Metode yang digunakan disini adalah metode interview bebas terpimpin, yaitu orang yang di interview memberikan kebebasan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, akan tetapi masih terikat oleh pertanyaan tersebut.

Interview ditujukan kepada seksi pemulihan sosial, urusan tata usaha, instruktur agama dan ketrampilan, sebagai informan untuk mengumpulkan data-data proses pelaksanaan pemberdayaan WTS di BPSWTS Cirebon.

Metode ini dimaksud untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari para pembina dan pegawai di Balai tersebut.

b. Metode Observasi

Disamping menggunakan metode interview, maka penulis juga menggunakan metode observasi. Dimana metode ini untuk memperkuat hasil dari interview. Sehingga metode observasi dapat

³⁸ Ibid, hlm. 82.

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan observasi non partisipan. Artinya penulis tidak terlibat langsung dalam aktifitas/ kegiatan tapi hanya mengikuti jalannya kegiatan tersebut.

Adapun observasi dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan pemberdayaan WTS serta mengenai kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan pemberdayaan wanita tuna susila di BPSWTS Cirebon.

c. Metode Dokumen

Metode dokumen merupakan pengumpulan data melalui cara pendokumentasian dari sumber-sumber data yang telah ada, dan biasanya merupakan tulisan atau catatan-catatan atau benda lainnya.

Jadi dokumen disini bukan sekedar data yang berbentuk tulisan saja, melainkan juga melalui bentuk menuen sejarah, piagam penghargaan dan lain-lainnya.

Namun yang penting adalah dokumen tersebut berupa tulisan dan dapat memberi keterangan. Metode ini penulisan dipergunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dengan metode-metode terdahulu. Dalam hal ini penulis mengambil data dari dokumen yang ada di BPS WTS Cirebon.

³⁹ Anus Sudiono, *Metode Riset dan Bimbingan Menulis Skripsi*, (Yogyakarta: Produksi UD. Rama, 1980), hlm. 24.

3. Metode Analisa Data

Pada prinsipnya analisa data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena meliputi pengolahan data dan menyusun data secara sistematis agar dapat dibaca dan diinterpretasikan.

Bentuk analisa yang akan digunakan adalah analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu analisa yang berdasarkan fakta-fakta yang ada di daerah penelitian dengan argumentasi logika yang sesuai dengan kerangka teoritik yang ada.

Adapun sistematika pembahasan analisis diskriptif kualitatif menurut Linclon dan Guba ada 3 langkah dalam penulisan laporan yaitu :

- a. Menyusun data yang diperoleh baik yang bersumber dari wawancara, dokumentasi maupun observasi sehingga apabila data-data tersebut akan diperlukan maka telah tersedia dan siap digunakan.
- b. Menyusun kerangka laporan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan adalah berusaha agar seluruh data tercakup dalam kerangka ini.
- c. Mengadakan ujian silang diperlukan dengan jalan menelaah indeks bahan data satu demi satu kemudian di pertanyakan apakah hal itu sesuai dengan kerangka.⁴⁰

⁴⁰ Lexi J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 227-228.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan pembahasan diatas menekankan pada pelaksanaan pemberdayaan di BPSWTS Cirebon dibidang agama (yaitu akhlak dan baca tulis Al-Qur'an) dan ekonomi (yaitu dibidang ketrampilan menjahit, membordil, tata boga, olah pangan, industri rumah tangga dan tata rias rambut).

Adapun yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberdayaan di BPSWTS Cirebon merupakan bagian kegiatan rehabilitasi wanita tuna susila yang berada di propinsi Jawa Barat yang memiliki tahapan-tahapan yaitu : penerimaan, Penyeleksian, pelaksanaan bimbingan (fisik, mental agama, sosial dan ketrampilan), resosialisasi, pemulangan siswi, penyaluran bimbingan lanjut.
 - a. Pelaksanaan Pemberdayaan di bidang agama di BPSWTS Cirebon mengedepankan pemahaman terhadap sikap atau tingkah laku. Sehingga tingkah laku siswi selama di Balai terus dikontrol dan terus menerus diberikan suri taladan yang baik, baik secara personal maupun kelompok.
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang pelaksanaannya dengan melakukan kegiatan dibidang ketrampilan kerja menggunakan manajemen berbasis sekolah kejuruan, alasannya antara lain :

bervariasinya kebutuhan siswi akan belajar, baragam kemampuan instruktur untuk mengembangkan profesionalnya, dan tuntunan dunia usaha untuk memperoleh tenaga yang bermutu.

2. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemberdayaan WTS adalah :
 - a). Faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan agama dan ekonomi adalah instruktur yang kompeten, adanya piket bergilir 24 jam, kerjasama yang baik dengan instansi lain, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tersebut.
 - b). Adanya hambatan yaitu jumlah instruktur yang minim, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, keadaan siswi yang bermasalah dengan psikologinya, ketidaksamaan dalam kedatangan, serta belum adanya fasilitas perpustakaan.

B. SARAN-SARAN

1. Bagi BPSWTS Cirebon pada umumnya dan para instruktur pada khususnya.
 - a. Kualitas dan kuantitas pengajar atau instruktur yang ada di Balai masih perlu di tambah khususnya jumlah instruktur dalam (instruktur yang telah ditetapkan Balai untuk memberikan bimbingan agama Islam).
 - b. Penerimaan siswi sebaiknya tidak terlalu jauh jarak waktu antara siswi satu dengan yang lainnya.
 - c. Pendidikan dan status siswi agar mendapat perhatian lebih.

- d. Sebaiknya segera dibuat perpustakaan untuk siswi.
2. Dan Kepada pemerintah hal ini Dinas Sosial diharapkan berusaha terus untuk menciptakan kesejahteraan sosial lahir dan batin terutama kepada siswi BPSWTS Cirebon.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam, karena hanya dengan pertolongan-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan menyajikannya dalam bentuk skripsi.

Penilaian dan tanggapan terhadap skripsi ini akan senantiasa penulis perhatikan. Namun perlu diketahui bahwa ketentuan-ketentuan metodologi penelitian sudah penulis perhatikan semaksimal mungkin dan penulis laporkan dengan apa adanya. Demikian pula saran-saran tidak lain hanyalah untuk usaha kemajuan pemberdayaan dalam upaya membekali siswi untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat.

Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan dan imbalan yang sepatutnya kepada mereka.

Akhirnya penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca serta perkembangan ilmu, amiiin.

Penulis

H. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad. *Etika, Ilmu Akhlak*. Jakarta: PT. Karya Impreso, 1990.
- Dam-Truong, Thanh. Penerjemah Ade Armando. *Seks, Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dep. Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djojohadikusumo, Sumintro. *Wanita Indonesi Dalam Pembangunan Jangka Panjang*. Jakarta: Pasarana Mentri Negara Riset Untuk Memperingati 32 Tahun PERWARI, 1977
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hariwoeryanto, S. Kasni. *Metode Penelitian Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Karya Nusantara. 1987.
- Haya Binti Mubarak AL-Barik. Terj. Amir Hamzah. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah, 1432 H.
- Hikmat, Hendri. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama, 2001.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1997.
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Kohlberk, Lawrence. Penj. John De Santo dan Agus Cremers. *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES, 1973.
- Machendrawaty, Ninih, dan Ahmad Safei, Agus. *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Idiologi Sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Marpaung, Laden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

- Mboi, Nafsiah. *Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: PSKW Program Pasca Sarjana UI, 1998.
- Munir, A. Sudarsono. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Renarka Cipta, 1992.
- Mudzhar, Atho. DKK. *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2001.
- Moleong, J. Lexi. *Metodologi penelitian*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2002.
- May, Nicky dan Networkes. *Tiada Jalan Pintas, Panduan Untuk Pendamping Kelompok Perempuan*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993.
- Modul Profil Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila (BPS WTS). Cirebon, 2003.
- Pedoman Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Menulis dan Membaca Al-Qur'an (M3A). Yogyakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an, 1995.
- Suara Hidayatullah. Edisi 12/XIV. April. 2002.
- _____. Edisi 8/XIV. Desember, 2001.
- Sapater, Sularso. *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Soetrisno Loekman. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kansius, 1997.
- Sudiyono, Anus. *Metode Riset dan Bimbingan Menulis Skripsi*. Yogyakarta: Reproduksi UD. Rama, 1980.
- Suparlan, YB. *Kamus Istilah Pekerja Sosial*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psi. UGM, 1984.